Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA KARAU KECAMATAN LIMPASU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Siti Mawaddah[1], Ni Made Musiyani Anjasmari[2], Nurul Hasanah[3]
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
e-mail: sitimawaddah653@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karau, Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang dipicu karena masih ditemukan kurang tepatnya dalam penentuan penerima bantuan, kurang optimalnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat, serta kurang tertibnya pengelolaan administrasi, khususnya dalam proses pendataan dan pembaruan data penerima bantuan. Berlandaskan pada analisis teori efektivitas Budiani, pengumpulan data lapangan dilakukan secara komprehensif melalui teknik observasi, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam bersama dua belas orang informan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Hasil evaluasi menunjukkan performa intervensi sosial ini secara umum masuk kategori cukup efektif. Dalam indikator ketepatan sasaran dan sosialisasi, hasilnya tergolong cukup efektif walau pemahaman warga belum sepenuhnya merata. Sementara itu, pada subvariabel pemantauan program, indikator kemudahan dalam proses pencairan dinilai sudah efektif namun pada indikator kepuasan terhadap pelaksanaan program dinilai cukup efektif karena masih ditemukan adanya keluhan dari beberapa informan seperti adanya penerima yang dikategorikan layak menerima tapi tidak terdafar sebagai penerima, dimensi pengawasan berkala serta pembaruan data terhitung masih kurang efektif. Kemudahan aksesibilitas penyaluran dana menjadi pendorong utama keberhasilan, sedangkan kendala terbesar berakar pada kurangnya evaluasi pemerintah desa serta adanya ketidak sesuaian sistem data desil kemiskinan dengan realitas riil di lapangan. Menanggapi temuan tersebut, Dinas Sosial direkomendasikan untuk mempererat koordinasi strategis bersama para pendamping lapangan dan aparatur desa demi mereformasi mekanisme verifikasi, mengoptimalkan proses evaluasi, serta memperketat pemantauan berkala agar bantuan ini dapat berjalan jauh lebih akurat, transparan, dan berdaya guna di masa yang datang.

Kata Kunci: Efektivitas Program, Program Keluarga Harapan, Kemiskinan

ABSTRACT

This descriptive qualitative study aims to examine in depth the effectiveness of the implementation of the Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) in Karau Village, Limpasu District, Hulu Sungai Tengah Regency. The study was motivated by the continued occurrence of inaccuracies in determining program beneficiaries, the less-than-optimal implementation of program socialization for beneficiary communities, and inadequate administrative management, particularly in the processes of data collection and updating beneficiary records. Based on Budiani's theory of effectiveness, field data were comprehensively collected through observation, documentation, and in-depth interviews with twelve informants selected using purposive sampling. The evaluation results indicate that, overall, the social intervention can be categorized as moderately effective. The indicators of targeting accuracy and program socialization were assessed as moderately effective, although community understanding has not yet been evenly distributed.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Meanwhile, within the program monitoring variable, the indicator of ease of fund disbursement was considered effective. However, the indicator of satisfaction with program implementation was rated as moderately effective because several informants reported complaints that some households considered eligible had not been registered as beneficiaries. In addition, the dimensions of periodic monitoring and data updating were found to be less effective. The ease of access to fund distribution was identified as the primary supporting factor for the program's success, while the main obstacles stemmed from the limited evaluation conducted by the village government and the mismatch between the poverty decile data system and the actual conditions in the field. Based on these findings, it is recommended that the Social Affairs Office strengthen strategic coordination with PKH facilitators and village officials to improve the beneficiary verification mechanism, optimize the evaluation process, and enhance periodic monitoring so that the program can be implemented more accurately, transparently, and effectively in the future.

***Keywords**: Program Effectiveness, Family Hope Program, Poverty*

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan pada dasarnya merefleksikan situasi sosiologis di mana seorang individu atau kelompok tidak memiliki instrumen ekonomi dasar atau sumber penghidupan yang memadai untuk menyokong standar hidup yang bermartabat. Secara legal-formal, problematika ini telah dijangkar dalam regulasi domestik, khususnya Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial serta Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang secara konseptual mendefinisikan kelompok marjinal ini sebagai entitas yang tidak memiliki mata pencaharian atau memiliki pendapatan namun gagal mencukupi kebutuhan pokok yang esensial bagi diri dan keluarganya. Realitas empiris mengenai dinamika ini terlihat jelas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah; berdasarkan dokumentasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan mencapai 11,62 ribu jiwa atau setara dengan 4,53%. Kendati instrumen Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada tahun 2025 mengindikasikan adanya tren positif berupa penurunan angka kemiskinan menjadi 10,98 ribu jiwa (4,21%) menunjukkan kontraksi sebesar 0,32% wilayah ini tetap mengemban beban sosiologis yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten atau kota tetangga di Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh sebab itu, urgensi untuk mengoptimalkan intervensi struktural melalui instrumen kebijakan publik yang masif dan komprehensif menjadi agenda krusial yang tidak dapat ditunda demi menjamin pemerataan kesejahteraan.

Guna mereduksi eskalasi kemiskinan tersebut, pemerintah meluncurkan strategi intervensi jaring pengaman sosial bersyarat yang dikenal sebagai Program Keluarga Harapan (PKH), sebuah kebijakan komplementer yang diinisiasi sejak tahun 2007. Fondasi operasional program jaminan ini merujuk pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nomor 31/KEP/MENKOP/KESRA/IX/2007, yang secara spesifik memprioritaskan akselerasi dan perlindungan sosial pada sektor krusial seperti kesehatan serta pendidikan nasional. Sebagai instrumen unggulan dalam ekosistem penanggulangan kemiskinan, PKH mendistribusikan dana stimulan finansial secara berkala kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mekanismenya dibagi ke dalam empat tahapan penyaluran dalam satu tahun anggaran, yang berarti pencairan dilakukan setiap tiga bulan sekali. Target utama dari skema ini diarahkan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan standardisasi BPS, dengan penekanan bahwa kepesertaan bersifat selektif dan mengikat; artinya, dana tunai hanya akan dikucurkan apabila penerima memenuhi kewajiban kontraktual yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, seperti pemeriksaan kesehatan berkala di posyandu bagi ibu hamil dan pemenuhan tingkat kehadiran sekolah bagi anak-anak.

Secara struktural, alokasi nominal bantuan finansial PKH diklasifikasikan ke dalam klaster komponen tertentu yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial secara spesifik. Berdasarkan matriks resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, skema distribusi

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

dana dirinci sebagai berikut: kategori Ibu Hamil mendapatkan Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap), Anak Usia Dini memperoleh Rp3.000.000 per tahun (Rp750.000 per tahap), sedangkan untuk klaster pendidikan, siswa SD menerima Rp900.000 per tahun (Rp225.000 per tahap), pelajar SMP dialokasikan Rp1.500.000 per tahun (Rp375.000 per tahap), dan jenjang SMA mendapatkan Rp2.000.000 per tahun (Rp500.000 per tahap). Sementara itu, klaster kesejahteraan sosial yang diperuntukkan bagi kelompok Lanjut Usia 60 tahun ke atas serta Penyandang Disabilitas Berat ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.400.000 per tahun (Rp600.000 per tahap). Seluruh ekosistem likuiditas ini dititipkan pengelolaannya kepada figur perempuan atau ibu yang mengurus rumah tangga bersangkutan demi memastikan orientasi belanja domestik diprioritaskan untuk pemenuhan gizi balita, perlengkapan sekolah (seperti seragam, tas, sepatu, dan buku), kebutuhan sandang-pangan lansia, serta biaya transportasi menuju fasilitas medis, yang diharapkan mampu mendorong perbaikan pola asuh dan prestasi belajar anak.

Kendati memiliki cetak biru kebijakan yang ideal, implementasi praktis PKH di tingkat lokal, khususnya di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, masih menghadapi berbagai anomali operasional yang menghambat pencapaian target makro program. Berdasarkan temuan observasi lapangan dari perangkat desa dan warga setempat, setidaknya terdapat tiga hambatan struktural utama: pertama, buruknya akurasi penargetan (inclusion dan exclusion error) di mana terdapat rumah tangga dengan kepemilikan aset mapan dan kondisi ekonomi lebih baik justru terdaftar sebagai penerima, sementara masyarakat miskin absolut terabaikan hingga memicu gelombang protes sosial. Kedua, lemahnya diseminasi dan sosialisasi informasi dari pihak pelaksana yang berimplikasi pada rendahnya pemahaman kolektif warga mengenai regulasi pemanfaatan dana, sehingga memicu deviasi fungsional di mana uang bantuan justru dialihkan untuk melunasi utang atau membeli komoditas konsumtif di luar koridor pendidikan dan kesehatan. Ketiga, terdapat problem ketidaktertiban administrasi yang kronis dalam aspek pemutakhiran serta verifikasi data berkala oleh birokrasi lokal, yang berujung pada keterlambatan proses validasi dan memicu stagnasi serta penundaan distribusi dana hak kepesertaan masyarakat. Realitas empiris inilah yang memicu urgensi dilakukannya studi mendalam mengenai "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Karau Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah" dengan meminjam pisau analisis Budiani (dalam Erika Dwi Nanda, 2024) yang menitikberatkan lokus kajian pada ketepatan sasaran, sosialisasi, kesesuaian tujuan, dan mekanisme pemantauan.

Dalam menakar kinerja suatu kebijakan publik, konsep "efektivitas" menempati posisi sentral sebagai parameter normatif pengujian keberhasilan institusional. Secara etimologis, efektivitas berakar dari kata efektif yang merepresentasikan daya guna, pengaruh, akibat, atau kemampuan dalam memproduksi output yang dikehendaki melampaui serangkaian alternatif tindakan. Khazanah teoritis administrasi publik yang dihimpun oleh Mutiarin dan Zainuddin (2021) menguraikan spektrum definisi yang kaya: Caster I. Bernard mendefinisikannya sebagai pencapaian target yang telah disepakati kolektif, sedangkan Drucker dan Nuruddin memaknainya sebagai tindakan melakukan sesuatu secara benar (doing the right things) dalam menggapai visi. Senada dengan hal tersebut, Handoko mengaitkannya dengan kompetensi memilih sasaran atau instrumen yang relevan untuk mencapai tujuan yang ditentukan, Komaruddin melihatnya sebagai derajat keberhasilan atau kegagalan manajemen, serta The Liang Gie dan Hidayat menegaskan bahwa efektivitas ialah rasio kuantitatif, kualitatif, dan temporal yang menunjukkan seberapa jauh target nyata berhasil diwujudkan dari rencana operasional awal. Ringkasnya, efektivitas menjadi instrumen komparatif substantif untuk menilai apakah kalkulasi proses linier dengan output ideal yang dicita-citakan, di mana Schuler (2019) menambahkan bahwa capaian tersebut turut dipengaruhi oleh faktor internal seperti kualitas pekerjaan, kerjasama, pengetahuan (soft skill), serta kehadiran dan ketepatan waktu pegawai.

Pengukuran operasional terhadap variabel efektivitas memerlukan konstruksi model sistematik agar mampu merekam realitas lapangan secara objektif. Campbell J.P. mengemukakan lima indikator utama pengukuran, meliputi tingkat keberhasilan program kerja, ketepatan pencapaian sasaran output, pemenuhan kepuasan pengguna layanan terhadap kualitas produk atau jasa,

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

optimalisasi rasio input-output, serta keberhasilan pemenuhan tujuan organisasi secara holistik. Perspektif ini diperluas oleh Gibson et al. melalui klasifikasi temporal yang membagi efektivitas ke dalam dimensi jangka pendek (produksi, efisiensi, kepuasan), jangka menengah (adaptabilitas dan pengembangan diri), serta jangka panjang berupa keberlanjutan program (sustainability). Sementara itu, Duncan menawarkan dimensi yang berfokus pada tiga ukuran utama, yaitu pencapaian tujuan melalui penahapan waktu dan target konkret, integrasi melalui sosialisasi dan pengembangan konsensus komunikasi antarorganisasi, serta adaptasi terhadap lingkungan kerja. Dalam lokus penelitian PKH ini, pisau analisis yang diadopsi secara eksklusif merujuk pada teori Budiani (dalam Erika Dwi Nanda, 2024) yang menyodorkan empat indikator taktis-aplikatif: akurasi ketepatan sasaran kelompok miskin, intensitas sosialisasi program kepada penerima manfaat, kedekatan hasil nyata dengan tujuan pemutusan rantai kemiskinan, serta konsistensi pemantauan pasca-program sebagai manifestasi akuntabilitas publik.

Eksplorasi mengenai program bantuan bersyarat ini tidak dapat dilepaskan dari dialektika teoritis seputar konseptualisasi kemiskinan dan kesejahteraan sosial. Badan Pusat Statistik memandang kemiskinan dari kacamata ekonomi murni, yakni ketidakmampuan finansial untuk mengompensasi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur melalui pengeluaran per kapita di bawah standar garis kemiskinan. Namun, sosiolog seperti Ali Khomsan memperluas cakrawala ini dengan menyatakan bahwa kemiskinan kerap bersifat struktural akibat diskriminasi sistemik terhadap kelompok rentan (lansia, perempuan, minoritas) yang dilabeli secara pejoratif, padahal ketidakberdayaan mereka bersumber dari ketiadaan akses. Pandangan ini diamini oleh Sedarmayanti yang mendefinisikannya sebagai ketiadaan jaminan ekonomi, informasi, pelatihan, serta kelegangan fisik, sedangkan John Friedmann secara radikal mengidentifikasi kemiskinan sebagai ketimpangan absolut dalam akumulasi basis kekuatan sosial seperti modal produktif, jaringan sosial, informasi, pendapatan, dan keterampilan politik. Sebagai antitesis, kesejahteraan dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, BAPPENAS, dan BKKBN sebagai kondisi dinamis yang terpenuhinya aspek material, spiritual, dan sosial secara proporsional, di mana pengeluaran non-pokok sebanding dengan pemenuhan gizi, proteksi psikologis, serta kebebasan dari rasa takut guna mencetak sumber daya manusia yang bermutu.

Sebagai muara intervensi, Program Keluarga Harapan diposisikan oleh Kementerian Keuangan dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 sebagai *center of excellence* atau episentrum perlindungan sosial untuk memotong transmisi kemiskinan antargenerasi. Berdasarkan kajian empiris dari Fidyatun (dalam Erika Dwi Nanda, 2024) yang menyitir data Microsave 2019, intervensi likuiditas bersyarat yang teratur ini secara nyata memperkuat daya beli domestik, terbukti mampu mengeskalasi volume konsumsi rumah tangga penerima manfaat hingga 3,8% lebih tinggi dibandingkan entitas non-KPM. Melalui penargetan berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Pusdatin Kesos Kemensos RI, pergeseran paradigma dari basis rumah tangga menjadi basis keluarga dilakukan sejak 2017 demi mempertegas tanggung jawab kolektif orang tua dalam pemenuhan hak dasar anak. Oleh karena itu, sinkronisasi antara cita-cita makro regulasi Permensos dengan penyelesaian anomali mikro di Desa Karau—baik melalui perbaikan ketertiban administrasi, penguatan pengawasan pemanfaatan dana, maupun intensifikasi sosialisasi—menjadi prasyarat mutlak agar dana bantuan sosial tersebut benar-benar mampu mentransformasikan masyarakat miskin menjadi komunitas yang mandiri, berdaya, dan sejahtera secara berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini mengambil lokus di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan menerapkan pendekatan kualitatif demi membedah secara mendalam dinamika efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Orientasi metodologis ini selaras dengan tesis Sugiyono (2017) yang menegaskan bahwa studi kualitatif ditujukan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci guna memproduksi data deskriptif berupa narasi tekstual, bukan angka-angka statistik. Lebih spesifik, ragam yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sebuah model yang

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

menurut Ibrahim (2018) berfungsi memaparkan sekaligus melukiskan realitas empiris di lapangan secara utuh, jernih, dan apa adanya tanpa adanya rekayasa variabel layaknya metode eksperimen. Guna mengoperasionalkan arah kajian, penelitian ini mengadopsi teori efektivitas dari Budiani (dalam Erika Dwi Nanda, 2024) yang menggarisbawahi empat dimensi utama operasional, meliputi ketepatan sasaran program, strategi sosialisasi, pencapaian tujuan, serta konsistensi pemantauan aktivitas di lapangan.

Dalam membedah fenomena tersebut, data yang dikumpulkan diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yakni data primer dan data sekunder. Menurut Ibrahim (2018), data primer merupakan pilar utama penentu keberhasilan studi yang memuat informasi serta fakta yang diperoleh langsung dari tangan pertama melalui teknik wawancara mendalam (in-depth interview) bersama informan kunci. Sebaliknya, data sekunder bertindak sebagai instrumen penunjang untuk memperjelas potret realitas, yang dalam konteks ini bersumber dari dokumen resmi, arsip, serta laporan berkala yang dikelola oleh aparatur pemerintah Desa Karau maupun pendamping PKH. Mengenai subjek penelitian, mengacu pada pemikiran Kaelan (dalam Ibrahim, 2018), entitas yang menjadi narasumber disebut sebagai informan. Penentuan informan tersebut dilakukan melalui teknik purposive sampling, sebuah strategi penarikan sampel bertujuan yang menetapkan kelompok partisipan berdasarkan kriteria khusus dan pertimbangan rasional yang dinilai paling relevan dengan substansi permasalahan PKH lokal.

Proses penghimpunan data di lapangan ditopang oleh kombinasi tiga teknik pengumpulan data konvensional yang saling melengkapi, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengamatan atau observasi bersandar pada pemikiran Sukmadinata (dalam Hardani dkk., 2020) yang memaknainya sebagai cara mengumpulkan data dengan memantau aktivitas yang sedang berjalan, baik secara partisipatif maupun non-partisipatif guna menangkap fenomena secara alami. Sementara itu, untuk merajut pemahaman yang lebih komprehensif, teknik wawancara dijalankan secara tatap muka memanfaatkan panduan wawancara (interview guide), sebuah proses yang didefinisikan oleh Najir (dalam Hardani dkk., 2020) sebagai metode pencarian keterangan lisan melalui dialog interaktif antara peneliti dan responden. Terakhir, sebagai instrumen pelengkap, studi dokumentasi diaplikasikan mengacu pada pandangan Sugiyono (dalam Hardani dkk., 2020), di mana peneliti mengumpulkan rekam jejak peristiwa masa lalu berupa berkas tertulis, regulasi kantor desa, serta dokumentasi visual yang memperkuat validitas temuan.

Mekanisme pengolahan informasi mengadopsi model analisis interaktif dari Miles dan Huberman (dalam Hardiansyah, 2018) yang merangkum tiga tahapan simultan: reduksi data untuk memilah dan membuang informasi yang tidak relevan, penyajian data (data display) dalam format narasi logis-sistematis, serta penarikan kesimpulan untuk melahirkan temuan baru yang kredibel. Demi memastikan keabsahan temuan tersebut, uji kredibilitas data dilakukan berdasarkan parameter Sugiyono (2019) melalui empat langkah strategis. Pertama, perpanjangan pengamatan diwujudkan melalui kunjungan berkala ke Desa Karau untuk memverifikasi konsistensi data. Kedua, peningkatan ketekunan ditempuh dengan menelaah transkrip wawancara secara cermat dan berulang guna menghindari bias atau ketidakakuratan. Ketiga, teknik triangulasi sumber diaplikasikan dengan mengomparasikan kesaksian koordinator PKH, pendamping lapangan, dan kepala seksi pelayanan desa. Keempat, penggunaan bahan referensi otentik berupa foto kegiatan serta dokumen administratif desa diintegrasikan secara utuh sebagai bukti empiris, sehingga seluruh hasil penelitian ini bebas dari plagiasi dan memiliki tingkat orisinalitas yang tinggi.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Karau Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Ketepatan Sasaran Program

   a. Kesesuaian Penerima Dengah Kriteria PKH

   Menilai efektivitas sebuah program pembangunan sebenarnya sederhana: sejauh mana hasilnya mampu menjawab jeritan kebutuhan, harapan, dan problem nyata yang

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

dihadapi masyarakat. Merujuk pada hasil wawancara, pengamatan langsung, dan penelusuran dokumen di Desa Telaga Itar, Kecamatan Kelua, Kabupaten Tabalong, pelaksanaan Musrenbangdes di sana sudah berada pada kategori cukup efektif. Proses perencanaannya tidak berjalan satu arah, melainkan hidup dan partisipatif karena mengalir langsung dari bawah mulai dari rembuk warga di tingkat RT hingga dikawal ke forum desa. Validitas proses ini pun bukan sekadar klaim, melainkan terekam kuat dalam sistem administrasi desa. Lembaran berita acara musyawarah hingga draf APBDes memperlihatkan dengan jelas bahwa program-program yang disepakati memang lahir dari rahim aspirasi masyarakat setempat.

Namun, jika melihat realitas di lapangan, capaian efektivitas ini diakui belum sepenuhnya optimal. Kendala klasik berupa keterbatasan anggaran desa memaksa pemerintah desa untuk menyaring ketat setiap usulan warga dan menetapkan skala prioritas yang kaku. Akibatnya, banyak program penting yang terpaksa ditangguhkan demi mendahulukan kebutuhan yang jauh lebih mendesak, seperti perbaikan fasilitas publik. Fenomena ini sangat sejalan dengan konsep efektivitas organisasi yang dikemukakan oleh Duncan dalam Richard M. Steers (Dedi Amrizal dkk., 2018:54), khususnya pada dimensi Pencapaian Tujuan. Teori tersebut menegaskan bahwa keselarasan antara output kerja dengan pemenuhan hajat hidup publik adalah indikator kunci keberhasilan, sebuah tantangan nyata yang saat ini sedang dihadapi Desa Telaga Itar dalam menjembatani ekspektasi warga dengan keterbatasan ruang fiskal yang ada.

b. Keakuratan Data Penerima PKH di Desa Karau

Tingkat validitas data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi penentu utama apakah bantuan sosial tersebut benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan. Berdasarkan hasil triangulasi data melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pengelolaan data tersebut dinilai sudah cukup efektif dengan tingkat keberhasilan mencapai 80–85%. Mayoritas penerima manfaat yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) memang sudah merepresentasikan kondisi riil di lapangan. Meski demikian, sistem ini belum sepenuhnya sempurna karena masih ditemukannya fenomena salah sasaran (inklusi dan eksklusi). Di satu sisi, terdapat warga dengan kemampuan ekonomi mapan yang masih menikmati bantuan, sementara di sisi lain, masih ada keluarga prasejahtera yang justru terlewat dari pendataan akibat keterlambatan pembaruan data.

Realitas di lapangan ini menegaskan perlunya mekanisme pemutakhiran dan verifikasi data yang dilakukan secara berkala dan responsif oleh pemerintah desa bersama pendamping PKH. Upaya sinkronisasi yang terus berjalan sebenarnya menunjukkan adanya komitmen kuat untuk meminimalkan kekeliruan distributif. Evaluasi capaian ini sangat selaras dengan teori efektivitas program dari Budiani (dalam Erika Dwi Nanda, 2024) khususnya pada dimensi ketepatan sasaran. Teori tersebut menekankan bahwa parameter utama keberhasilan sebuah program sosial sangat bergantung pada kesesuaian antara basis data administratif dengan realitas objektif masyarakat. Oleh karena itu, akurasi data yang mutakhir bukan sekadar persoalan administratif, melainkan pilar krusial agar visi kesejahteraan dan pemutusan rantai kemiskinan melalui PKH dapat terwujud secara optimal.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

2. Sosialisasi Program
   a. Kejelasan Informasi

      Tingkat kejelasan informasi merupakan faktor krusial dalam memastikan masyarakat memahami seluruh regulasi Program Keluarga Harapan (PKH), mulai dari persyaratan, hak, hingga kewajiban penerima manfaat demi mencegah terjadinya disinformasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, penyampaian informasi melalui sosialisasi dan pertemuan kelompok rutin dinilai sudah cukup efektif. Efektivitas ini sejalan dengan teori Budiani (dalam Erika Dwi Nanda, 2024) mengenai sub-variabel sosialisasi program, yang mengukur keberhasilan program dari cara pelaksana mengedukasi masyarakat penerima manfaat.

      Meski demikian, data di lapangan menunjukkan hasil yang berimbang, di mana 50% warga merasa informasi sudah sangat gamblang, sementara 50% sisanya masih merasa kurang jelas. Kendala utama yang menghambat penyerapan informasi ini meliputi keterbatasan waktu sosialisasi, kurangnya kedisiplinan peserta saat pertemuan, penggunaan istilah yang rumit, serta rendahnya daya tangkap sebagian warga, khususnya kelompok lanjut usia. Akibatnya, pemahaman yang menyeluruh belum sepenuhnya tercapai, sehingga pendamping PKH perlu melakukan pendekatan yang lebih adaptif agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh seluruh lapisan masyarakat.

   b. Partisipasi masyarakat dalam sosialisasi program PKH

      Keterlibatan aktif warga Desa Karau dalam sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) tercermin dari kehadiran mereka dalam pertemuan, kesediaan menyimak informasi, serta keaktifan dalam memberikan respons. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemerintah desa serta pendamping PKH Kecamatan Limpasu, tingkat kehadiran warga tergolong sangat tinggi, yakni berkisar antara 75% hingga 95%. Angka ini didorong oleh adanya ketegasan regulasi lokal; warga yang absen satu hingga dua kali akan menerima teguran, sedangkan ketidakhadiran tiga kali berturut-turut berisiko pada penghapusan kepesertaan. Meski demikian, sistem ini tetap fleksibel dan inklusif karena lansia serta penyandang disabilitas diizinkan untuk diwakili oleh anggota keluarga mereka saat kegiatan berlangsung.

      Secara keseluruhan, kendati masih ditemukan sedikit kendala minor seperti keterlambatan dan kurangnya kedisiplinan beberapa peserta, implementasi sosialisasi ini dinilai sudah berjalan cukup efektif. Tingginya partisipasi dan kepatuhan masyarakat dalam pertemuan kelompok rutin ini terbukti berhasil memperluas pemahaman mereka mengenai PKH, sehingga pelaksanaan program di lapangan menjadi jauh lebih optimal. Fenomena keberhasilan ini sejalan dengan teori efektivitas dari Budiani (dalam Erika Dwi Nanda), yang menegaskan bahwa indikator utama keberhasilan suatu program terletak pada masifnya sosialisasi serta kedalaman keterlibatan masyarakat di dalamnya.

3. Tujuan Program
   a. Kemudahan dalam proses pencairan bantuan

      Kelancaran akses dan simplisitas birokrasi menjadi indikator utama dalam mengukur efisiensi distribusi dana Program Keluarga Harapan (PKH) agar hak penerima manfaat dapat tersalurkan tepat waktu. Berdasarkan temuan lapangan di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, mekanisme pencairan bantuan ini terbukti sudah berjalan sangat efektif. Melalui pengamatan langsung dan wawancara

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

dengan para informan, masyarakat dapat mengambil dana secara rutin setiap tiga bulan sekali tanpa hambatan yang berarti. Keberadaan agen penyalur yang dekat dengan pemukiman warga menjadi faktor pendukung utama lancarnya proses ini, meskipun kendala teknis seperti ketidakstabilan jaringan internet dan fluktuasi jadwal pencairan berkala masih kerap terjadi.

Secara keseluruhan, realisasi indikator kemudahan dalam penyaluran bantuan di wilayah ini telah mencapai hasil yang optimal. Kesimpulan tersebut diperkuat oleh fakta bahwa warga tidak lagi menghadapi prosedur yang rumit atau jarak tempuh yang jauh untuk mencairkan hak mereka. Kondisi di lapangan ini selaras dengan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Erika Dwi Nanda), yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu program sosial sangat bergantung pada fleksibilitas pelaksanaan di lapangan serta kemudahan masyarakat dalam mengakses manfaat yang disediakan.

b. Kepuasan terhadap pelaksanaan program

Evaluasi terhadap efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menunjukkan bahwa penyaluran bantuan telah berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Melalui kombinasi data wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, masyarakat penerima manfaat menyatakan kepuasan yang tinggi karena dana yang diterima mampu menopang kebutuhan esensial keluarga. Meskipun masih ada beberapa masyarakat yang masih belum merasa puas terhadap pelaksanaan program karena menganggap adanya penerima yang seharusnya masuk sebagai kategori penerima manfaat namun justru belum terdaftar sebagai penerima manfaat. Bantuan finansial tersebut dialokasikan secara produktif oleh warga untuk memenuhi kebutuhan pangan bulanan serta mengakomodasi biaya perlengkapan sekolah anak, yang secara signifikan berhasil meringankan beban finansial rumah tangga prasejahtera di wilayah tersebut.

Capaian ini cukup positif menegaskan bahwa implementasi PKH di Desa Karau telah memenuhi seluruh indikator keberhasilan program hingga mencapai tingkat cukup efektif. Realita di lapangan ini selaras dengan teori efektivitas Budiani yang menggarisbawahi bahwa keberhasilan suatu kebijakan diukur dari signifikansi manfaat yang dirasakan langsung oleh target sasaran. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok dan aspek pendidikan, program ini terbukti sukses bertransformasi sebagai instrumen jaring pengaman sosial yang mampu mendongkrak taraf kesejahteraan masyarakat penerima manfaat secara berkelanjutan.

4. Pemantauan Program

a. Pembaharuan data

Proses pemutakhiran berkala terhadap data penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sangat krusial dilakukan demi menjamin penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembaruan data di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum berjalan optimal. Hasil investigasi melalui wawancara dan observasi menyingkap bahwa realisasi pemutakhiran data di wilayah tersebut baru menyentuh angka 45%. Mandeknya persentase ini dipicu oleh ketergantungan pemerintah desa pada basis data usang dari tahun-tahun sebelumnya, yang diperparah oleh kendala jaringan internet serta keterlambatan transmisi laporan dari tingkat desa. Akibatnya, terjadi salah sasaran dalam distribusi bantuan di mana masyarakat

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

yang secara ekonomi sudah mandiri justru masih tercatat sebagai penerima serta munculnya keterlambatan dalam proses pencairan dana bagi warga yang membutuhkan.

Kondisi karut-marut ini sejalan dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani (dalam Erika Dwi Nanda, 2024) khususnya pada dimensi pemantauan program. Teori tersebut menegaskan bahwa pengawasan yang ketat dan berkelanjutan pasca-implementasi mutlak diperlukan untuk mengawal agar jalannya program tetap berada pada koridor tujuan awal. Oleh karena itu, perbaikan mekanisme verifikasi dan validasi data secara berkala dan presisi menjadi urgensi yang tidak bisa ditawar lagi, agar pelaksanaan program PKH ke depan dapat beroperasi secara lebih akurat, efisien, dan menyasar kelompok masyarakat yang benar-benar berhak.

b. Peran pemerintah desa dalam pengawasan

Keterlibatan aparat desa dalam mengawasi jalannya Program Keluarga Harapan (PKH) sangat krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bebas dari penyelewengan. Sayangnya, realita di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menunjukkan bahwa fungsi pengawasan ini belum berjalan optimal. Baik dari hasil wawancara maupun pengamatan langsung di lapangan, proses evaluasi terkesan mandek karena pemerintah desa masih mengandalkan data usang. Akibatnya, terjadi salah sasaran dalam penyaluran bantuan, di mana warga yang kondisi ekonominya sudah membaik justru masih terdaftar sebagai penerima, sementara kondisi riil masyarakat di lapangan gagal terpantau dengan baik.

Secara umum, lemahnya pengawasan di Desa Karau dipicu oleh tidak adanya agenda evaluasi yang rutin, minimnya pemantauan langsung, serta lambatnya pembaruan data kemiskinan. Kendala-kendala ini membuat indikator keberhasilan program menjadi tidak efektif, sehingga diperlukan pembenahan sistem pengawasan berkala agar bantuan bisa lebih tepat guna. Fenomena ini sejalan dengan teori efektivitas dari Budiani (dalam Erika Dwi Nanda, 2024) mengenai variabel pemantauan program, yang menegaskan bahwa kontrol berkala sangat dibutuhkan untuk memastikan pelaksanaan di lapangan tetap selaras dengan tujuan awal program.

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan di Desa Karau Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah

1. Faktor pendukung Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Karau
   a. Aksesibilitas yang memadai dalam penyaluran dana bantuan

Aksesibilitas penyaluran bantuan merujuk pada seberapa mudah masyarakat penerima manfaat dalam menjangkau dan mencairkan dana dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, kemudahan akses ini menjadi pilar utama yang mendukung keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses pengambilan dana kini jauh lebih praktis karena masyarakat tidak perlu lagi mengantre lama di bank. Kehadiran agen toko sembako lokal yang berfungsi sebagai tempat penarikan resmi sangat membantu warga, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan transportasi atau kendala finansial untuk ongkos perjalanan.

Melalui sinergi dengan agen terdekat di lingkungan desa, proses distribusi bantuan kini berlangsung lebih cepat, lancar, dan tepat sasaran. Lokasi pencairan yang dekat dengan pemukiman membuat warga dapat menghemat waktu dan tenaga secara

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

signifikan. Secara keseluruhan, data wawancara dan observasi menegaskan bahwa pengelolaan aksesibilitas yang strategis dan efisien di Desa Karau telah berhasil mengoptimalkan pelaksanaan program PKH, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat tanpa hambatan yang berarti.

2. Faktor penghambat Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Desa Karau
   a. Kurangnya evaluasi terhadap penerima bantuan PKH

      Minimnya pengawasan berkala terhadap penerima Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi celah besar dalam rantai pemantauan kesejahteraan masyarakat. Selama ini, penilaian kondisi sosial ekonomi serta tingkat kepatuhan keluarga penerima manfaat (KPM) kerap terabaikan karena tidak dijalankan secara konsisten. Akibatnya, otoritas lokal kesulitan melacak dinamika finansial warga, yang berujung pada tingginya risiko salah sasaran dalam penyaluran bantuan.

      Fakta di lapangan, khususnya di Desa Karau, memperlihatkan bahwa evaluasi dan pembaruan data sering kali baru bergerak jika ada laporan warga yang meninggal dunia. Selebihnya, aparatur desa cenderung mengandalkan basis data lama dari pemerintah pusat tanpa adanya verifikasi mandiri yang proaktif. Kendala operasional ini diperparah oleh resistensi sebagian masyarakat terhadap pembaruan data, sehingga proses validasi menjadi mandek dan efektivitas pengawasan program bantuan ini gagal berjalan maksimal.

   b. Ketidak sesuaian sistem data desil kemiskinan dalam penetapan penerima bantuan PKH

      Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah menghadapi kendala besar akibat ketidakakuratan data desil kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, potret kesejahteraan masyarakat yang terekam dalam sistem digital sering kali berseberangan dengan realitas ekonomi yang ada. Kaku dan otomatisnya sistem dalam mengklasifikasikan tingkat kemiskinan memicu fenomena salah sasaran; warga yang secara finansial sudah mandiri justru terdata di desil rendah dan menerima bantuan, sedangkan keluarga yang benar-benar kesulitan justru terlempar ke desil tinggi sehingga luput dari jaminan sosial.

      Kesenangan data ini pada akhirnya menjadi batu sandungan utama bagi efektivitas penyaluran bantuan sosial di wilayah tersebut. Fakta di lapangan memperlihatkan kontras yang jelas antara status administratif warga dan kondisi hidup mereka yang sebenarnya. Oleh karena itu, akurasi data desil memegang peran krusial dalam keberhasilan program ini. Agar bantuan PKH dapat menyentuh masyarakat yang benar-benar berhak, evaluasi mendalam serta pembaruan data secara berkala dan kontekstual mutlak diperlukan demi menyelaraskan sistem dengan kondisi riil di masyarakat..

SIMPULAN

Evaluasi terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Karau, Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, menunjukkan tingkat keberhasilan yang secara umum sudah cukup Efektif, meskipun masih menyisakan sejumlah catatan krusial. Sisi positif dari program ini terlihat dari ketepatan sasaran yang mayoritas telah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kelancaran penyampaian informasi oleh pendamping, tingginya partisipasi warga, serta kemudahan akses pencairan dana lewat agen desa yang terbukti mampu meringankan beban ekonomi penerima manfaat. Kemudahan aksesibilitas dalam penarikan dana tanpa perlu mengantre panjang ini

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

menjadi faktor pendukung utama kelancaran program di lapangan. Kendati demikian, efektivitasnya masih terganjal oleh beberapa faktor penghambat, seperti kurang akuratnya pemutakhiran data yang memicu terjadinya salah sasaran (adanya warga mampu yang terdaftar sementara warga miskin justru terlewat), kendala jaringan saat pencairan, hingga minimnya kedisiplinan warga saat sosialisasi. Kelemahan ini diperparah oleh sistem pembaruan data yang tidak sinkron dengan kondisi riil masyarakat serta lemahnya fungsi pengawasan dan evaluasi berkala dari pihak pemerintah desa. Oleh sebab itu, agar kemanfaatan program jaminan sosial ini dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan tepat sasaran di masa mendatang, diperlukan pembenahan total pada aspek validasi data, perluasan edukasi masyarakat, serta penguatan kontrol dari otoritas setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Anonim. 2011. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Anonim. 2018, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (2020). Kecamatan Limpasu dalam angka 2020. https://hulusungaitengahkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (2023). Kecamatan Limpasu dalam angka 2023. https://hulusungaitengahkab.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (2025). Persentase penduduk miskin Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025. https://hulusungaitengahkab.bps.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah. (2020). Data kependudukan kabupaten, kecamatan dan desa se-Kabupaten Hulu SungaiHTengahHtahunH2020HsemesterHII.Hhttps://hulusungaitengahkab.bps.go.id

Hardani, H., et al. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. Pustaka Ilmu.

Hardiansyah. (2018). Kualitas pelayanan publik. Gava Media.

Ibrahim. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Alfabeta..

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelaksanaan program keluarga harapan.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021b). Program keluarga harapan (PKH). https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh

Muhammad Sawir (2020). Birokrasi Pelayanan Publik Konsep, Teori, Dan Aplikasi.

Mutiarin, D., & Zainuddin, A. (2021). Manajemen birokrasi dan kebijakan. Pustaka Belajar.

Nanda, E. D. (2024). Analisis efektivitas program keluarga harapan (PKH).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Wahyuni, & Jamaluddin. (2025). Efektivitas pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Hayaping Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur. Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JAPB), 8(2), 1816–1832. https://doi.org/10.35722/japb